



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR 1 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG JASA ADMINISTRASI DAN UANG LEGES  
JO. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 12  
TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 14 TAHUN 2001  
TENTANG RETRIBUSI JASA ADMINISTRASI DAN UANG LEGES**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didalamnya tidak ada mengatur tentang pungutan uang leges dan jasa administrasi;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2001 tentang Jasa Administrasi dan Uang Leges Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Administrasi dan Uang Leges sebagaimana diubah, perlu dilakukan pencabutan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2001 tentang Jasa Administrasi dan Uang Leges Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Administrasi dan Uang Leges.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Penataan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 694).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14); dan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 3).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

dan

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG JASA ADMINISTRASI DAN UANG LEGES JO. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI JASA ADMINISTRASI DAN UANG LEGES**

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2001 tentang Jasa Administrasi dan Uang Leges (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2001 Nomor : 03, Seri : B) Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Administrasi dan Uang Leges (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor: 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**UJANG ISKANDAR**

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR 1 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG JASA ADMINISTRASI DAN UANG LEGES  
JO. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 12  
TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 14 TAHUN 2001  
TENTANG RETRIBUSI JASA ADMINISTRASI DAN UANG LEGES**

**I. UMUM**

Berdasarkan ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang.

Bahwa Undang-Undang yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mengatur tentang retribusi perlu dicabut, karena berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah bersifat tertutup sehingga pemerintah daerah tidak dapat memungut jenis pajak daerah dan retribusi daerah selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 180 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta penjelasan bahwa Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan masih tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut yaitu pada tanggal 1 Januari 2010, sehingga Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2011 dan harus dicabut.

Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Jasa Administrasi Dan Uang Leges Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Retribusi Jasa Administrasi Dan Uang Leges adalah untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Atas dasar pertimbangan hukum tersebut, demi memberi legalitas dan demi kepastian hukum yang menyangkut masalah pungutan Retribusi Surat izin Usaha Perdagangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Adapun Peraturan Daerah yang mengatur pungutan leges adalah Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Jasa Administrasi Dan Uang Leges Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Retribusi Jasa Administrasi Dan Uang Leges.

Peraturan Daerah beserta Peraturan Pelaksanaannya sebagaimana dimaksud diatas sepanjang yang berkaitan dengan penarikan dan pemungutan Retribusi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup Jelas.

Pasal 2  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR : 26